

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Gerakan sosial adalah salah satu bentuk utama aksi kolektif. Menurut Macionis (dalam Sukmana, 2016: 4) menyatakan bahwa Gerakan sosial adalah kegiatan terorganisir yang bertujuan mempromosikan atau menekan perubahan sosial. Saat ini, kita sering menghadapi demonstrasi oleh gerakan sosial oleh siswa dan anggota masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan sosial memiliki dampak besar pada perkembangan negara ini.

Di era demokrasi saat ini, perlawanan masyarakat dan gerakan sosial yang menentang dan mendorong perubahan kebijakan publik, perubahan politik dan sosial semakin lazim di tingkat regional, nasional dan global. Ini menyebar. Ada banyak gerakan sosial utama di Indonesia dengan berbagai masalah. Ini dimulai dengan masalah perlawanan terhadap pemerintah seperti pendidikan, budaya dan kemanusiaan, yang merupakan masalah yang sangat penting dan seseorang harus berjuang untuk perubahan sosial.

Dengan munculnya gerakan sosial baru, gerakan perempuan, gerakan lingkungan, gerakan perdamaian, dll., Minat dalam gerakan sosial telah meningkat lagi. Gerakan sosial adalah bentuk aksi kolektif dengan orientasi konfrontatif yang jelas terhadap musuh sosial dan politik tertentu, dan jaringan

yang dekat di luar organisasi oleh para aktor yang terikat oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat. Dapat didefinisikan sebagai yang dilakukan di. Melampaui bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama. Sujatmiko (dalam Sukmana, 2016:6).

Sebagai contoh di Kota Tasikmalaya, yakni adanya gerakan sosial oleh komunitas berbasis kemanusiaan yang bernama *Tasik Help Fondation*. *Tasik Help Fondation* (THF) merupakan sebuah organisasi yang terbentuk atas kesukarelawan yang menjawab sisi permasalahan kemanusiaan seperti bencana alam, kesenjangan kesehatan yang di sebabkan oleh tekanan ekonomi, dan permasalahan sosial lainnya. Framing organisasi tersebut yakni pergerakan kemanusiaan, dapat dibuktikan dalam setiap kegiatan kemanusiaannya seperti penggalangan dana, menjadi relawan bencana alam dan lain – lain.

Gerakan sosial seperti diatas adalah salah satu gerakan sosial baru karena bentuk gerakannya lebih terfokus terhadap nilai – nilai modern yang ada di dalam kehidupan sosial seperti kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepedulian antar sesama manusia, bukan lagi gerakan sosial yang memperjuangkan permasalahan kelas atau konflik politik. Seperti yang dikatakan Cohen (dalam Singh, 2010) gerakan sosial baru umumnya merespon dan membidik isu – isu yang bersumber dari *civil society* daripada perekonomian dan negara.

Gerakan sosial baru pada umumnya merespon isu – isu yang bersumber dari masyarakat sipil, dan membidik domain sosial masyarakat sipil daripada

permasalahan ekonomi dan negara, juga membangkitkan isu – isu yang berhubungan dengan demoralisasi struktur kehidupan sehari – hari dan memusatkan perhatian pada bentuk komunikasi dan identitas kolektif.

Isu kemanusiaan dalam pelaksanaannya telah dirumuskan dalam Pancasila sebagai nilai atau pedoman khusus. Hal tersebut merupakan salah satu kewajiban negara untuk menjawab perihal isu kemanusiaan maupun hal yang lain yang termasuk dalam kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Meskipun begitu, dalam kenyataannya kita masih menghadapi sejumlah masalah krusial. Salah satunya adalah masih dirasakannya fasilitas umum yang terbatas bagi masyarakat. Sementara pemerintah harus menjangkau wilayah masyarakat yang amat luas, hal tersebut menyebabkan beberapa daerah terjadi kesenjangan. Maka dari itu, kesenjangan ini harus segera mungkin dipikirkan upaya pemecahannya.

Seperti yang terjadi di daerah Kawasen. Kawasen sendiri dilihat dari rekam jejak sejarahnya merupakan sebuah Kabupaten yang terbentang wilayahnya dari barat Cimaragas sampai dengan ke timur bendungan maganti, dan dari utara Wanareja ke selatan sampai dengan daerah Pamotan. Karena saat ini sudah terambil oleh daerah otonomi baru Banjar dan Pangandaran, akhirnya secara geografis Kawasen menjadi daerah terjepit dan yang tersisa yakni ada lima kecamatan yang tergabung dalam eks kewedanaan Banjarsari, yaitu Banjarsari,

Pamarican, Banjarnayar, Purwadadi, dan Lakkok. Dengan kondisi seperti ini, otomatis daerah Kawasen seperti menjadi daerah yang terisolir karena diapit oleh dua daerah yang baru menjadi daerah otonomi baru (DOB).

Kawedanan atau yang dalam bahasa Jawa disebut kawedanaan merupakan wilayah administrasi pemerintahan yang berada dibawah kabupaten dan diatas kecamatan yang berlaku pada masa Hindia – Belanda dan beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia yang dipakai di beberapa provinsi seperti di Jawa Tengah. Gerakan tersebut didasari oleh keinginan masyarakat yang tergabung dalam PAKAS PURBBAPALA (Paguyuban Kawasen Purwadadi, Banjarsari, Banjarnayar, Pamarican, Lakkok) yakni mengadakan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Ciamis. Tuntutan tersebut berupa penegasan untuk segera dibangun Rumah Sakit di Banjarsari dengan cara melakukan aksi damai peduli pembangunan rumah sakit umum di daerahnya dengan bertema “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” yang berlangsung di Alun – alun Banjarsari.

Aksi tersebut dilakukan atas dasar sebuah bentuk kekecewaan masyarakat atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis terkait janji pembangunan rumah sakit di wilayah tersebut. Tuntutan berawal pada saat periode kepemimpinan Bupati Ciamis sebelumnya yakni Iing Syam Arifin yaitu pada tahun 2016, Pemda Ciamis merencanakan akan membangun dua rumah sakit yakni di Kecamatan Kawali dan Kecamatan Banjarsari. Tetapi yang menjadi permasalahan yakni

pembangunan rumah sakit tersebut bukan di prioritaskan di Banjarsari, melainkan di Kawali.

Selain menuntut pembangunan rumah sakit umum, masyarakat juga menuntut agar fasilitas umum dan pemerataan pembangunan di daerah Kawasen lebih di tingkatkan, seperti adanya mobil pemadam kebakaran dan lain – lain. Seperti yang dirasakan oleh masyarakat daerah Lakkok yang juga termasuk daerah Kawasen, Kecamatan Lakkok yakni sebagai lumbung padi terbesar di Kabupaten Ciamis menginginkan ada perhatian khusus dalam bentuk bantuan apapun untuk membantu meningkatkan kualitas padi di daerah mereka.

Pada tanggal 23 Juni 2019 PAKAS PURBBAPALA mengadakan aksi yang di pimpin oleh Asep Davi selaku ketua Paguyuban Kawasen dan diikuti oleh beberapa lapisan masyarakat seperti Ormas, LSM, Komunitas Seni, Komunitas Olahraga, Pesantren, juga masyarakat sekitar yang antusias mengikuti aksi tersebut. Aksi tersebut berupa penggalangan dana yang berpusat di sekitar alun – alun Banjarsari. Aksi tersebut akan dilaksanakan hingga adanya penetapan pembangunan rumah sakit Banjarsari dalam APBD Ciamis.

Aksi tersebut akhirnya berakhir setelah 27 hari yakni pada tanggal 19 Juli 2019, setelah mendapat respon dari Pemerintah Kabupaten Ciamis terkait pembangunan rumah sakit tersebut. Sebagai bentuk dari ucapan rasa syukur, masyarakat mengadakan syukuran, sekaligus pembubaran panitia atas diresponnya aksi damai peduli pembangunan rumah sakit umum Kawasen. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, Ormas,

Komunitas, LSM dan seluruh masyarakat yang tentunya telah berpartisipasi dari awal hingga akhir.

Secara umum, rencana pembangunan yang telah melalui studi kelayakan tentu merupakan sebuah rencana yang serius. Pada tahun 2018 Pemda Ciamis telah mengalokasikan dana untuk pembebasan lahan sebesar 4 miliar, karena tidak terserap jadi silfa untuk tahun berikutnya, berarti dana tersebut mengendap di kas daerah sudah dua tahun anggaran dan memasuki tahun ke tiga. Adapun biaya untuk pembangunan rumah sakit sendiri belum ada, yang pasti rumah sakit tersebut masuk dalam kategori kelas C.

Terkait dengan pembebasan lahan Pemda Ciamis telah melakukan negosiasi dengan pemilik lahan yang berada di Desa Sindanghayu tetapi terjadi ketidaksepakatan antara pemilik tanah dengan tanah yang direkomendasikan apprasial. Hingga sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Ciamis belum menindak lanjuti terkait pembebasan lahan untuk pembangunan rumah sakit di Banjarsari karena kendala tersebut. Masyarakat berharap seharusnya Pemda Ciamis memperjuangkan apa yang telah dilaksanakan bukan malah mengulur – ngulur lagi waktu untuk tidak segera dilakukannya pembangunan rumah sakit tersebut.

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai progres gerakan sosial yang dilakukan oleh PAKAS PURBBAPALA dalam upaya memenuhi tuntutananya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana gerakan sosial PAKAS PURBBAPALA dalam upaya menuntut pembangunan rumah sakit umum Kawasen di Kecamatan Banjarsari?

## **C. Batasan Masalah**

Peneliti melakukan pembatasan terhadap permasalahan yang ada dan telah dirumuskan agar terarah dan terkonsentrasi dalam melakukan penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai gerakan yang dilakukan oleh PAKAS PURBBAPALA dalam upaya menuntut pembangunan rumah sakit umum Kawasen, Banjarsari.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gerakan sosial PAKAS PURBBAPALA dalam upaya menuntut pembangunan rumah sakit umum Kawasen, Banjarsari.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian tentang gerakan sosial, dan dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian yang sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta dapat menyebarluaskan informasi serta masukan mengenai kajian gerakan sosial, dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.